



Available online at :

<https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/jeamm>

JEAMM, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2021, Hal 84-95

JEAMM

KEHADIRAN BUMDes TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI DESA DI KECAMATAN OBA SELATAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA

Muhammad Thahrim¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun

¹Email: muhammad.thahrim@unkhair.ac.id

Dikirimkan, Maret 2021
Diterima, Oktober 2021

ABSTRAK

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Badan usaha milik desa ini adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi dan sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian: (1) keberadaan adan Usaha Milik Desa (2) Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah adanya Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Hasil penelitian ini ialah keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Tidore Kepulauan yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa

Kata kunci: badan usaha milik desa, Pendapatan Masyarakat, kelembagaan

ABSTRACT

The existence of Village-Owned Enterprises (BUMDES) as a Village Economic Strengthening. This village-owned enterprise is one of the institutions engaged in the social and economic fields and as a service provider to the village community, especially regarding the business sector. The research method used in this research is quantitative research with a descriptive approach, with the research focus: (1) the existence of village-owned enterprises and (2) community income before and after the existence of village-owned enterprises (BUMDES). The results of this study are that the existence of village-owned enterprises is in accordance with the Tidore Islands regional regulations which are then regulated by the village with village regulations regarding village-owned enterprises.

Keyword: village-owned enterprises, community income, institutions



Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan
Manajemen Multiparadigma
Volume 2, Nomor 2,
Oktober 2021

PENDAHULUAN

Pembangunan desa harus diupayakan agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya local (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Maka bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa: “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”

Badan usaha milik desa ini, usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang

pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut akan muncul dengan adanya Undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan atas Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa : dalam rangka mewujudkan amanat undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis system kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan system politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan miniatur dan sample yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan melalui desa inilah badan usaha milik desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah. BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran *free-rider* yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek *rente* Nurcholis, (2011, h.88)

Melihat posisi badan usaha milik desa ini dalam menghadapi realitas arus desak intervensi modal domestik dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangat keras sekali, disamping itu badan usaha milik desa ini hanya bermodal tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta bermodal besar maka posisi badan usaha milik desa ini tak dapat dibandingkan. Dengan sumberdaya alam yang dimiliki oleh desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di pedesaan. Kehadiran badan usaha milik desa ini sendiri akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Diharapkan badan usaha milik desa ini mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa, dan sebagai perusahaan desa.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, karena itu, pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa, lebih dari itu BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya.

Mengingat pentingnya badan usaha milik desa bagi masyarakat desa untuk mengembangkan ekonomi desa, maka di tetapkan desa memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota yaitu berupa dana desa yang di salurkan kepada BUMDes guna untuk mengembangkan ekonomi desa. Dengan adanya BUMDes maka diharapkan ekonomi desa dapat berkembang dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat desa dan penyerapan tenaga kerja masyarakat desa. BUMDes ada karena adanya kegagalan pasar yang terjadi, maka dari itu pemerintah membentuk BUMDes sebagai bentuk pemerintah untuk mengembangkan potensi desa dan mengembangkan ekonomi desa.

Adapun alasan peneliti untuk meneliti BUMDes dikarenakan memiliki pengaruh yang signifikan bagi pengembangan ekonomi desa. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk memilih judul tentang “Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan”

Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah.

DAU merupakan sumber pendapatan yang penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi pengeluarannya. Besarnya DAU yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka daerah tersebut masih bergantung kepada Pemerintah Pusat yang menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri dan belum siap menjadi daerah otonom seperti yang tertuang dalam UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit DAU yang diterima maka daerah tersebut mandiri dan siap menghadapi otonomi.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.

PAD merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Besarnya PAD yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri dan menjadi daerah otonom.

Pengaruh Flypaper Effect pada Prediksi Belanja Daerah.

Widodo (2007:35) memberikan penjelasan bahwa dalam sebuah proses penyusunan anggaran ada sebuah teori yang dikenal dengan istilah incrementalism. Sistem penganggaran Incrementalism adalah sistem penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan. *Incrementalism* juga terjadi pada penyusunan Belanja Daerah ditahun berikutnya dimana pemerintah daerah berusaha menambah atau mengurangi jumlah rupiah pengeluaran dan PAD yang diterima agar dana transfer yang diterima konstan dengan tahun sebelumnya atau malah bertambah.

Hipotesis.

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

- H1** : adalah DAU secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- H2** : adalah PAD secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- H3** : adalah terjadi *Flypaper effect* dan cenderung menyebabkan peningkatan jumlah Belanja Daerah di tahun berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian *kuantitatif* karena dalam penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam penelitian ini diteliti hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikategorikan sebagai variabel independent, terhadap Belanja Daerah (BD) yang dikategorikan sebagai variabel dependent, serta mendeteksi fenomena *flypaper effect*.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara yang terletak di Sofifi. Objek penelitian ini adalah laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Utara, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dari bulan Oktober - Desember 2013.

Jenis data yang akan diteliti adalah data sekunder, berupa catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data penelitian bersumber dari laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Data yang diambil hanyalah data laporan keuangan yang telah dipublikasikan dalam rentang tahun 2004-2011. Data diperoleh dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan www.bpk.go.id dan Kementerian Dalam Negeri www.kemenkeu.go.id serta DPPKAD Provinsi Maluku Utara

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*) dengan menggunakan *Software* SPSS. Untuk menguji keberartian koefisien regresi secara simultan dilakukan uji-F, sedang untuk menguji pengaruh secara parsial dilakukan uji-t. Model regresi untuk uji hipotesis I adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + e$$

Kriteria penerimaan hipotesis III menurut Maimunah (2006:12), “Untuk dapat dikatakan telah terjadi *flypaper effect* maka hasil yang diperoleh haruslah menunjukkan nilai koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD dan keduanya signifikan atau PAD tidak signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 19.557 + 0.022 PAD + 1.517 DAU + e$$

Dari persamaan ini maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar 19.557 yang berarti bahwa jika semua variabel independen tidak mengalami perubahan, maka untuk membiayai belanja daerahnya, daerah akan melakukan pinjaman/ utang sebesar 19.557 milyar rupiah. Kemudian berdasarkan hasil analisis, jika Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah maka nilai belanja daerah akan bertambah sebesar 0.022 juta rupiah. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah, maka nilai belanja daerah akan bertambah sebesar 1.517 juta rupiah.

Hasil perhitungan regresi pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah (BD) mampu dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 76.5% atau 0.765 yang ditunjukkan oleh besarnya nilai R-square (R^2). Sedangkan sisanya adalah variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Demikian juga, hasil tersebut menunjukkan

bahwa model regresi yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini dapat dikatakan model yang baik (*Goodness of Fit*).

Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan hubungan DAU terhadap belanja daerah dalam hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa jika DAU meningkat, maka belanja daerah juga meningkat. Hubungan ini sesuai dengan tujuan pemberian DAU yaitu untuk meningkatkan belanja daerah. Kemudian secara parsial juga DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah yang di tunjukan atas nilai Koefisien PAD yang lebih kecil daripada DAU menandakan bahwa DAU lebih mempengaruhi Belanja Daerah daripada PAD. Besarnya pengaruh DAU terhadap belanja daerah disebabkan oleh besarnya jumlah DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, sehingga rasio DAU terhadap belanja daerah juga tinggi. Sifat DAU yang berupa *grant* dari pemerintah pusat menjadikan daerah seolah-olah menggantungkan belanja daerahnya dari alokasi dana ini. Artinya bahwa transfer dari pemerintah pusat berupa DAU menyebabkan pemerintah daerah tidak mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dalam menunjang pengeluaran pemerintah daerah.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2009) yang menemukan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan dana alokasi umum merupakan bentuk transfer dana yang paling penting selain bagi hasil. Rendahnya kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerahnya ditambah dengan kualitas SDM yang belum memadai diperkirakan menjadi penyebab tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini juga berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maimunah (2006: 11) yang menyatakan bahwa terdapat keterikatan yang sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Daerah. Hal serupa juga dinyatakan oleh Ndadari dan Adi (2008: 16) bahwa besarnya PAD suatu daerah dipengaruhi oleh besarnya alokasi DAU. Hal ini menunjukkan kecenderungan pemerintah daerah enggan untuk menggali potensi daerahnya karena mereka merasa belanja daerah sudah cukup dibiayai dengan DAU saja. Adi (2007: 13-14) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa daerah yang ditelitinya masih mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat dibandingkan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya atau terdapat kecenderungan ketika DAU yang diterima semakin tinggi maka upaya pajak pemerintah kabupaten atau kota justru semakin rendah. Hal serupa juga dinyatakan oleh Wijaya (2008: 66) dan Novianingsih (2009) dimana dana perimbangan dalam hal ini termasuk DAU merupakan variabel yang lebih besar pengaruhnya terhadap belanja daerah daripada pendapatan asli daerah tersebut.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD)

Colombatto (2001) dalam Abdullah (2008) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian spread PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. menduga power legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan spread PAD tidak sesuai dengan preferensi publik. Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendaptan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Setiap Kota dan Kabupaten di Provinsi Maluku Utara khususnya Kota dan Kabupaten mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing – masing yang didapat melalui sumber – sumber yang terdapat di daerah tersebut. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga mempunyai PAD sendiri yang didapat dari retribusi daerah. Tingkat kemandirian dari suatu SKPD dapat dilihat dari PAD masing – masing SKPD yang telah diterima. Apabila suatu SKPD memperoleh PAD yang lebih besar dari dana transfer, maka SKPD tersebut dapat dikatakan memiliki tingkat kemandirian karena dapat membiayai semua pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD tersebut, begitu juga sebaliknya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhubungan dalam kinerja SKPD. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (PuspitaSari, 2009).

PAD merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Besarnya PAD yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri dan menjadi daerah otonom.

Hasil regresi menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil ini sesuai dengan temuan Mutmainnah (2006). Tidak signifikannya PAD dalam mempengaruhi belanja daerah disebabkan karena rendahnya kontribusi PAD terhadap belanja daerah dibandingkan dengan DAU. Tingginya proporsi dana perimbangan sebagai sumber penerimaan daerah yang mencapai 80 persen dari total penerimaan (Simanjuntak dalam Handayani, 2009) mengakibatkan PAD hanya berkontribusi sangat kecil.

Rendahnya penerimaan daerah dari PAD disebabkan oleh rendahnya upaya penggalan potensi daerah yang dicerminkan oleh fluktuatifnya *tax effort* di daerah. Padahal *tax effort* mencerminkan usaha pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatannya (Susanti, dalam Handayani 2009).

Fenomena Flypaper Effect

Hipotesis III digunakan untuk membuktikan terjadinya *flypaper effect* pada Belanja Daerah. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa nilai Standardized Coefficients Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.015 tidak lebih besar dari nilai Standardized Coefficients Dana Alokasi Umum yaitu sebesar 0.876 dan hanya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah artinya, terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa pemerintah provinsi Maluku utara lebih besar mengoptimalkan belanjanya dengan menggunakan dana alokasi sehingga terjadi *flypaper effect* pada anggaran pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara. Kuncoro (2007: 22) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa dana alokasi dari pemerintah pusat menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Yang ada justru pemerintah daerah berupaya bagaimana caranya dana alokasi yang diterima dari tahun ke tahun tetap atau meningkat. Wijaya (2008: 66) dan Maimunah (2006: 11) dalam penelitiannya mempunyai persamaan pendapat mengenai temuan adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang merupakan suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer daripada menggunakan kemampuan sendiri.

Penelitian oleh Ndadari dan Adi (2008: 17) yang didukung oleh penelitian dari Shinta (2009: 78) juga menyatakan bahwa terjadi *flypaper effect* pada dana alokasi umum yang membuktikan bahwa terjadi kecenderungan perilaku asimetris pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat. (Priyo, 2009) juga menunjukkan adanya keterikatan yang erat antara transfer pemerintah pusat dengan belanja daerah.

Terdapatnya fenomena ilusi fiskal di dalam kinerja anggaran pemerintah daerah Jawa Tengah disebabkan karena tingginya ketergantungan daerah transfer pemerintah pusat. Yang ditunjukkan oleh besarnya rasio dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah dibandingkan dengan rasio PAD terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa daerah sangat bergantung pada dana transfer tersebut. Tidak efisiennya penggunaan dana transfer dalam alokasinya terhadap belanja daerah untuk belanja infrastruktur menjadikan daerah tidak memiliki sumber penerimaan. Selain itu, menurut Kuncoro (2007) saat masyarakat (pemerintah daerah) menerima transfer maka akan terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah dan peningkatan konsumsi barang publik. Hal ini menunjukkan bahwa transfer meningkatkan konsumsi akan barang publik namun tidak menjadi substitut pajak daerah.

Besarnya efek multipilier DAU terhadap belanja daerah, bila dipandang dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan kondisi yang memprihatinkan. Karena, secara tidak langsung hubungan ini membuktikan betapa daerah memiliki ketergantungan keuangan yang sangat besar kepada pemerintah pusat. Berdasarkan pada pola hubungan dalam model, besarnya nominal DAU sangat menentukan besarnya belanja daerah pada tahun berikutnya. Diperlihatkan oleh besarnya koefisien DAU terhadap belanja daerah yang mampu meningkatkan hingga 1.362 juta setiap kenaikan 1 juta DAU.

Seiring dengan berjalannya waktu, tingkat kemandirian daerah belum memperlihatkan kemajuan yang berarti bahkan cenderung menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Adi (2007) serta Setiaji dan Adi (2007) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah dalam era otonomi justru mengalami penurunan. Pemerintah daerah justru semakin menggantungkan diri pada DAU daripada mengupayakan peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Penelitian serupa yang dilakukan oleh Adi (2007), memperlihatkan indikasi kurang seriusnya daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan lebih mengandalkan penerimaan DAU yang bersifat hibah. Sebagai pertimbangan praktis, upaya ini lebih dipilih daripada meningkatkan PAD secara signifikan, sehingga sebagai konsekuensinya PAD yang diterima menjadi lebih kecil. Kondisi ini sejalan dengan pandangan para pakar ekonomi. Dominannya peran dana transfer terhadap pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah pada dasarnya tidak efektif dalam memberikan bantuan bagi pemerintah daerah terhadap aliran transfer itu sendiri (Kuncoro, 2006).

Alderete (dalam Priyo, 2006) menegaskan bahwa ketika pemerintah pusat memberikan bantuan melalui transfer (dalam bentuk dana perimbangan) kepada daerah untuk meningkatkan belanja daerah, muncul spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon perubahan transfer itu secara asimetris. Perilaku asimetris ini dapat dilihat dengan adanya pengeluaran yang berasal dari bantuan (*grants*) yang memberikan keuntungan pada pemerintah daerah, sedangkan di lain pihak anggaran juga berkurang. Maimunah (2006) membuktikan adanya perilaku asimetris yang ditunjukkan oleh pengaruh DAU terhadap belanja daerah dan PAD (dalam Priyo, 2006). Besarnya proporsi DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah, tetapi besarnya proporsi PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pemerintah khususnya DAU begitu dominan dalam membiayai belanja daerah.

Fenomena semacam ini oleh Dollery dan Worthington (1999) dan Priyo (2009) diindikasikan sebagai ilusi fiskal (*fiscal illusion*). Logikanya, setiap penerimaan pemerintah harus berdampak terhadap besaran pengeluaran dan pada gilirannya semakin besar pengeluaran pemerintah maka pemerintah seharusnya mendapat manfaat dengan meningkatnya penerimaan pemerintah di masa mendatang, misal meningkatnya kontribusi pajak masyarakat. Artinya terdapat hubungan yang simetris antara sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apabila kenyataan yang terjadi sebaliknya (terjadi hubungan yang asimetris) maka dapat dikatakan terjadi ilusi fiskal, dikarenakan pemerintah pusat ataupun masyarakat tidak menyadari bahwa mereka memberikan kontribusi (baik dana transfer maupun pajak/retribusi daerah) yang lebih besar dari yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Kecenderungan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hibah pemerintah pusat secara asimetris,

memberikan dampak negatif terhadap upaya peningkatan potensi daerah. Salah satu indikatornya adalah pendapatan asli daerah (PAD).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data dalam penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Tidak signifikannya Pendapatan Asli Daerah dalam mempengaruhi Belanja Daerah (BD) disebabkan karena rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Besarnya pengaruh DAU terhadap belanja daerah disebabkan oleh besarnya jumlah DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, sehingga rasio DAU terhadap belanja daerah juga tinggi
3. Terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal ini berarti bahwa adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat khususnya dana alokasi umum (DAU), kondisi ini terjadi dimana pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer daripada menggunakan pendapatan asli daerah (PAD)

Saran

Beberapa saran dan masukan yang dapat dihasilkan dari penelitian pada Tesis ini antara lain adalah:

1. Bagi pemerintah Kabupaten/ kota di Provinsi Maluku Utara, diharapkan lebih maksimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berpotensi meningkatkan persentase penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian memperluas cakupan wilayah penelitian yang antara satu kabupaten dan kabupaten lainnya yang memiliki hubungan pertanggungjawaban, sebagai contoh beberapa kabupaten dalam satu provinsi. Hal lain yang dapat diteliti adalah terjadinya *flypaper effect* yang dibandingkan tiap tahunnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syukriy & Abdul Halim. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali.. *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi VI Yogyakarta*
- Adi, Priyo Hari. 2008. *Relevansi Transfer Pemerintah Pusat dengan Upaya Pajak (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Jawa)*. The 2nd National Conference Faculty of Economics Widya Mandala Catholic University.
<http://lpks1.wima.ac.id/pphks/accurate/makalah/IE7.pdf>.
- Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Atiah Handayani. 2009. "Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)." Skripsi Tidak Dipublikasikan, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang.
- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekpi Depkeu, Jakarta.

- Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Indonesia. Berbagai edisi penerbitan, BPS Provinsi Maluku Utara. _____ Ringkasan APBD Provinsi. Berbagai edisi penerbitan, BPS Provinsi Maluku Utara.
- Bagir Manan,. 1994. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah* di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta, Erlangga
- Bernardo Gatot Tri Bawono. 2008. “*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah.*” Tesis Tidak Dipublikasikan. Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Darwanto, dan Yulia Yustika Sari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.* Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. 26 – 28 Juli 2007
- Dwirandra. 2008. “*Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002 – 2006.*” Jurnal Ilmiah. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Udayana, Denpasar.
- Emelia, 2006. “*Mengukur Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dalam Mendorong Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 di Kabupaten Lampung Timur.*” Tesis Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Elmi. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia.* Jakarta: UI Press
- Firmansyah. 2006. *Modul Panel Data Regression Aplikasi dengan Eviews 4.0.* Semarang: LSKE
- Firmansyah. 2008. *Modul Praktek Ekonomika Dasar: Estimasi, Asumsi Klasik dan Variabel Dummy Aplikasi Eviews 4.0.* Semarang: LSKE
- Gideon Tri Budi Susilo dan Priyo Hari Adi. 2007. “*Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah)*” Paper disajikan pada Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometric.* The McGraw Hill Companies Inc. New York.
- Guritno Mangkoesoebroto,. 1994. *Ekonomi Publik.* Yogyakarta: BPFE.
<http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/47/>
- Laras Wulan Ndadari dan Priyo Hari Adi. 2008. “*Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemrintah Pusat.*” The 2nd National Conference UKWMS. Surabaya.
- Halim, A.. 2001. *Anggaran Daerah dan Fiscal Stress, Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia.* *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.* 16 (4): 346-357.
- Halim, A.. 2009. *Analisis Varian Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.* Disertasi Doktor dalam Ilmu Ekonomi, UGM, Yogyakarta, tidak diterbitkan.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.* Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Khusaini, 2006, *Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah.* Jakarta
- Prakosa Kesit Bambang. 2006. “*Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY.*” JAAI, Vol 08 No.2
- Pangesti Kurnia Nur, 2008, *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota.*
- Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia.* Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. 26–28 Juli 2007

- Mardiasmo, 2001 *Desentralisasi Sistem dan Desentralisasi Fiskal*, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada,, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002, *Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, JAAI
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.Yogyakarta.
- Miyasto, 2009. *Bahan Kuliah Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal*. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Miyasto, 2009. *Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai. Studi Mengenai Dampak terhadap Harga, Penerimaan dan Struktur*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta
- Muhammad Iqbal Lubekran. 2007. "Analisa Dampak Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Perkembangan Daerah di Indonesia Periode 2001- 004." Tesis Tidak Dipublikasikan. Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universita Indonesia. Jakarta.
- Maimunah, Mutiara. 2006. "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera." Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- Nagathan, dan KJ Sivagnanan. 1999. "Federal Transfer and Tax Effort of States in India." Indian Economic Journal.
- Ndadari, Laras Wulan, dan Priyo Hari Adi. 2008. *Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat*. Makalah disampaikan dalam The 2nd National Conference UKWMS. Surabaya. 6 September 2008
- Sari Noni Puspita, 2009, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Abd) (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Wilayah Pulau Jawa Periode 2009-2011)
- Nazir M., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999 Rampai: *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Priyo Hari Adi. 2006. "Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa- Bali)." Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padan
- Priyo Hari Adi. 2007. .Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi.. *The 1st National Accounting Conference*. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Pramuka Agus Bambang. , 2010. "Flypaper on Government Spending Areas in Java. " *Journal of Development Economics*, Vol. No. 11. 1, June 2010, 1-12
- Rushdi Bahrul Ulum and sasna, Hadi (2010) [*determinants Of Financial Performance Analysis And Detection Of Local Government Fiscal Illusion \(Case Studies in Indonesian Province in 2005 - 2008\)*](#).
- Simanjuntak Daslan, 2006. menganalisis pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Tesis tidak dipublikasi, Magister Ekonomi Pembangunan USU. Medan.
- Widodo, Pambudi Tri. 2007. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi UMUM (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali. (Studi pada Kabupaten/Kota di Bali)*. <http://rac.uui.ac.id/server/document/Private/2008072511265203312374.pdf>. Diakses 3 September 2009
- Wijaya, Sandhi. 2008. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Besarnya Belanja Daerah (Studi pada Kabupaten se-Karesidenan Pekalongan)*. Skripsi. Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. (Tidak dipublikasikan).

- Walidi. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening, Tesis (tidak dipublikasikan)*. Medan. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2009.
- Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit UNDIP: Semarang.
- _____ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah*.
- _____ *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta
- _____ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 2008. *Pedoman Pelaksanaan Review Atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
- _____ UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)